



KOMITMEN INVESTASI UNI EMIRAT ARAB (UEA) PADA INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY (INA) 2021

Ahmad Mudhofarul Baqi^{1*}

¹Departemen Hubungan Internasional; Universitas Indonesia; Indonesia

*email: ahmad.mudhofarul@ui.ac.id

Abstract

This article explains the UAE commitment as the largest major investor in the INA. This commitment contrasts with the realization of UAE's investment in Indonesia, which was only US\$ 0.2 million and was in the 50th position in Q1 2021, an also contrary to the Indonesia's economic performance which is experiencing contraction and the decrease of corruption perceptions index. Researcher uses explanative research methods with yield institutions approach from K.S Reddy. This study found that the UAE's commitment to invest in INA is based on influencing and resulting factors. The influencing factors related to the UAE's outward investment strategy through the ADIA, the increasing intensity of bilateral and Indonesian investment diplomacy to the UAE. and the resulting factor in term of potential returns and the UAE's economic integration in the IUAE-CEPA. This indicates that the determination of UAE'S investment drive by economic and political motives.

Keywords: *Indonesia; Indonesia Investment Authority (INA); outward investment strategy; Sovereign Wealth Funds; United Arab Emirate (UAE)*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan komitmen Uni Emirat Arab (UEA) menjadi investor utama terbesar pada Indonesia Investment Authority (INA). Komitmen ini kontras dengan realisasi investasi UEA di Indonesia yang hanya US\$ 0.2 Juta dan menduduki posisi 50 pada Q1 2021. Penempatan dana ini juga bertolak belakang dengan kondisi performa ekonomi Indonesia yang sedang mengalami kontraksi dan indeks korupsi yang merosot. Peneliti menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan pendekatan yield institutions dari K.S Reddy sebagai alat analisis. Penelitian ini menemukan bahwa komitmen UEA berinvestasi di INA dilandasi oleh faktor yang memengaruhi dan faktor imbal hasil. Faktor yang memengaruhi, berhubungan dengan strategi *outward investment* UEA melalui Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), meningkatnya intensitas bilateral dan diplomasi investasi Indonesia ke UEA, serta faktor imbal hasil berupa potensi imbal hasil dan integrasi ekonomi UEA dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA). Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan investasi UAE tidak hanya bermotif ekonomi namun juga politik.

Kata Kunci: *Indonesia; Indonesia Investment Authority; Sovereign Wealth Funds; strategi outward Investment; Unit Emirat Arab (UEA)*

Pendahuluan

Pembahasan mengenai Sovereign Wealth Funds (SWFs) sangat menarik dalam kajian ekonomi politik internasional abad 21. Sejak diperkenalkan oleh Andrew Rozanov pada tahun 2005 (Rozanov, 2005), sampai sekarang, terdapat 100 SWFs dengan total akumulasi investasi mencapai US\$ 9,1 triliun pada tahun 2021 (Sovereign Wealth Fund Institute, 2021). Sovereign Investment Laboratory mendefinisikan SWFs sebagai dana investasi yang dimiliki oleh negara yang berbeda dengan bank sentral maupun kementerian keuangan, mencakup skala domestik maupun internasional, bertujuan mencari keuntungan, serta berbentuk dana abadi bukan uang pensiunan (Megginson & Fotak, 2015: 737). SWFs memiliki tiga tujuan utama, antara lain: memaksimalkan dana, stabilisasi, dan pembangunan ekonomi. Pemaksimalan dana bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kekayaan negara, stabilisasi berhubungan dengan stabilisasi fiskal dan nilai tukar, sementara pembangunan ekonomi berkaitan dengan investasi pada infrastruktur fisik maupun sosial serta kebijakan industri yang membawa imbal hasil (PWC, 2015).

Pembahasan SWFs tidak hanya menarik dari sisi nilai dan tujuan, namun juga dari peran negara yang semakin vital dalam perekonomian. Kehadiran SWFs menunjukkan adanya pergeseran dan penataan ulang peran negara dalam aktivitas perekonomian. Kehadiran SWFs menggeser peran negara dari yang hanya mencakup investasi ke dalam (domestik) menuju ke luar (asing) dan membentuk ulang peran negara menjadi regulator sekaligus agen mobilitas modal internasional (Wood & Wright, 2015: 275-276). Peran vital negara pada kehadiran SWFs inilah yang mendorong Indonesia mendirikan Indonesia Investment Authority (INA).

Indonesia Investment Authority (INA) merupakan SWFs Indonesia yang berdiri atas mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mandat itu ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat. Berbeda dengan SWFs dari negara lain yang berfungsi untuk mengelola dana surplus domestik, INA memiliki perbedaan terkait mekanisme sumber pendanaan. Mekanisme pendanaan INA bersumber dari SWFs negara lain, dana pensiun negara lain, dan dari *private equity* (Investor.id, 2021). Skema pendanaan INA melalui *master fund* (dana pengelolaan) dan *thematic fund* (dana

tematis berdasarkan sektor). *Master funds* yang nantinya akan mengelola dana investasi dari investor utama dan berskala besar sebelum masuk ke sektor tertentu. *Thematic fund* berhubungan dengan investasi di jenis sektor tertentu sesuai dengan kapasitas, dan karakter investor. Sementara sumber pendanaan awal INA berasal dari suntikan pemerintah Indonesia sebesar US\$ 5 miliar dan menargetkan pertumbuhan hingga US\$ 20 miliar dalam waktu dekat (Indonesia Investment Authority, 2021).

Komitmen pendanaan melalui *letter of interest* (LOI) maupun *Memorandum of understanding* (MoU) ke INA datang dari Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Jepang dan UEA. Amerika Serikat dan Kanada masing-masing melalui US International Development Finance Corporation (DFC) dan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) siap membenamkan investasi sebesar US\$ 2 miliar ke INA. Belanda melalui APG Belanda dan Macquarie, masing-masing sebesar US\$ 1,5 miliar dan US\$ 300 juta. Jepang dengan Japan Bank for International Cooperation berkomitmen menanamkan dana sebesar US\$4 miliar ke INA (CNBCIndonesia, 2021).

Sumber pendanaan terbesar INA akhirnya datang dari Uni Emirates Arab (UEA). Komitmen dan pengumuman investasi tersiar melalui Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation UEA pada 24 Maret 2021. Informasi tersebut menyatakan bahwa UEA akan menyuntikkan dana sebesar US\$10 Miliar atau setara dengan Rp140 Triliun (asumsi kurs Rp 14.000) pada INA atas instruksi dari Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (mofaic.gov.ae, 2021). Dana investasi akan diarahkan pada sektor strategis Indonesia, termasuk infrastruktur, jalan, pelabuhan, pariwisata, pertanian, dan sektor potensial lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Keputusan Uni Emirates Arab menjadi investor utama terbesar INA kontras dengan realisasi investasi UEA di Indonesia yang minim. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Q1 2021, realisasi investasi UEA di Indonesia hanya menyentuh angka US\$ 0.2 juta dan menduduki posisi ke 50 (BKPM.go.id, 2021). Turun dari periode tahun sebelumnya Q1 2020, realisasi investasi UEA di Indonesia mencapai angka US\$ 2.9 juta dan berada di posisi ke 30 (BKPM.go.id, 2020). Selain itu, antara Indonesia dan UEA, bukan mitra dagang terbesar antara satu dan yang lain. Selama beberapa tahun, UEA tidak menduduki posisi investor terbesar di Indonesia begitu juga sebaliknya (Moec.gov.ae, 2021). Sementara dari sisi internal, lembaga pemeringkat utang global *Standard and Poor's* (S&P)

menaksir *investment grade* Indonesia berada pada level BBB dengan *outlook* negatif pada 2021 (spglobal.com, 2021). Lebih rendah dari Abu Dhabi yang sudah mencapai level AA (*Investment Grade*) pada 2021 (spglobal.com, 2021). Ditambah lagi, keputusan investasi UAE juga berbanding terbalik dengan performa pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 (BPS.go.id, 2021). Apalagi, dari sisi transparansi maupun korupsi, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia menempatkan Indonesia pada peringkat 120 di tahun 2020, merosot jauh dari tahun 2019 yang berada di peringkat 85 (Transparency.org, 2021).

Kajian mengenai INA secara tematis lebih banyak berfokus pada pandangan legal-institusional dan ekonomi-bisnis. Pandangan yang mempersoalkan dimensi hukum pada pendirian INA datang dari Putu Samawati dan Shinta Paramita (2021) yang menyatakan bahwa legalitas INA ambigu antara sebagai badan hukum swasta atau badan hukum publik. Ambiguitas ini bersumber dari keistimewaan INA sebagai lembaga yang hanya dapat didirikan dan dibubarkan secara hukum. Keistimewaan ini juga berpotensi memicu diskriminasi antar lembaga negara (Samawati & Paramita, 2021). Sementara, Justin Alexander Halim (2021) menemukan bahwa INA merupakan terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mendatangkan investasi asing untuk pendanaan domestik. Terobosan baru ini tentu harus menyesuaikan standar SWFs internasional sambil menyesuaikan dengan keadaan (Halim, 2021).

Sedangkan, pada pandangan ekonomi-bisnis, kajian mengenai INA berfokus pada alasan terbentuk, potensi investasi asing, perbedaan dengan SWFs negara lain, dan tantangan yang akan dihadapi INA. Pandu Adi Cakranegara (2021) melihat alasan berdirinya INA adalah untuk mendanai proyek infrastruktur yang belum mendapatkan pendanaan sebab masih banyaknya potensi proyek yang bisa didanai (Cakranegara, 2021). Sementara, Devi (2021) dengan metode komparatif melihat bahwa struktur modal dan fokus pengelolaan INA berbeda dengan SWFs di negara lain. INA bergantung pada sumber dana luar negeri sedangkan SWFs di negara lain bersumber dari dana dalam negeri. Selain itu, INA hanya berfokus mengelola dana investasi dalam negeri sedangkan SWFs negara lain menginvestasikan dananya ke luar negeri (Devi, 2021). Sedangkan, Mangir Taruna (2021) mengungkap sejumlah tantangan bisnis terkait pembentukan INA yang bersandar pada UU Cipta Kerja yang lebih banyak

menuai protes, alih-alih investasi. Selain itu, terdapat masalah transparansi dan akuntabilitas pada pembentukan INA (Habir, 2021).

Berdasarkan kajian pustaka sebelumnya, fokus kajian hanya pada pembahasan legal-institusional dan ekonomi-bisnis. Secara eksplisit maupun implisit belum ada yang menyorot dari sisi politik-ekonomi. Kelima penelitian tersebut juga hanya berfokus pada sisi domestik Indonesia. Tentu berbeda dengan penelitian ini yang akan mengambil perspektif UEA dalam memutuskan investasi di INA. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, tulisan ini akan berfokus untuk menjawab pertanyaan mengapa UEA berkomitmen menjadi investor utama terbesar di Indonesia Investment Authority (INA)?.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama, menguraikan mengenai strategi *outward investment* UEA melalui Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Bagian ini mengulas sistem geopolitik sekaligus diplomasi ekonomi UEA, dan ADIA sebagai lembaga sumber pendanaan institusional UEA. Bagian kedua, menjelaskan peningkatan intensitas hubungan bilateral dan diplomasi investasi Indonesia ke UEA. Bagian ini menguraikan secara kronologis peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan UEA ditandai dengan peningkatan kunjungan, interaksi, delegasi, sekaligus seremoni penamaan masjid dan jalan atas nama kedua pemimpin negara sebagai simbol kedekatan, dan pada bagian diplomasi akan diuraikan mengenai bentuk dan tujuan diplomasi Indonesia ke UEA yang menghasilkan beragam kerja sama *Government to Government* maupun *Business to Business*. Bagian ketiga, potensi imbal hasil dan integrasi ekonomi antara UEA dan Indonesia berkenaan dengan ROI (Return on Investment) dalam bentuk akumulasi nilai aset yang dikelola, kinerja dana, dan investasi sekuensial. Sedangkan integrasi ekonomi terbentuk dalam Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Bagian Keempat atau terakhir akan menyimpulkan faktor determinan keputusan investasi UAE di INA yang tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi melainkan juga faktor politik.

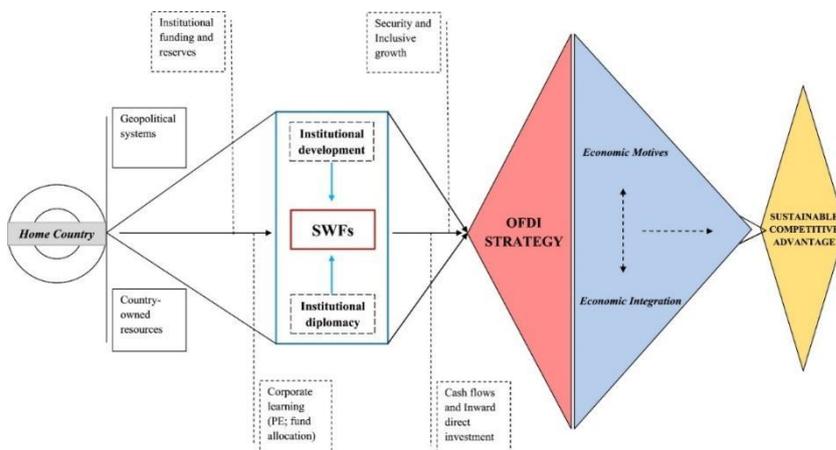
Pendekatan Yield Institutions

Secara akademis maupun praktis terdapat beragam faktor yang menentukan dan motivasi yang mendorong investasi SWFs ke pasar luar negeri. Faktor dan motif itu

antara lain: faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial budaya (Megginson, You, & Han, 2013: 550-552). Faktor ekonomi berhubungan dengan performa ekonomi negara tujuan, tingkat pengembalian modal, perlindungan investor, dan perkembangan pasar modal. Faktor ekonomi dilandasi oleh asumsi bahwa SWFs adalah aktor rasional, keputusan investasi atas pertimbangan ekonomi, dan bertujuan untuk diversifikasi aset (Megginson, You, & Han, 2013: 550). Sementara, faktor politik bertalian dengan keterlibatan aktif pemerintah untuk berinvestasi di industri strategis, dengan dasar investasi atas pertimbangan strategis dan non-strategis. Pertimbangan rasio investasi strategis lebih minim, jika negara asal dana lebih baik dari sisi pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, sedangkan rasio investasi strategis tidak akan terpengaruh oleh dinamika pasar negara tujuan (Megginson, You, & Han, 2013: 551). Faktor politik berakar dari asumsi bahwa SWFs dimiliki, dikelola, dan dipantau oleh negara, sehingga keputusan investasinya bersandar pada pertimbangan politik, alih-alih pertimbangan komersial (Megginson, You, & Han, 2013: 551). Faktor sosial budaya berkaitan dengan kesamaan budaya dan kedekatan geografis sehingga mengurangi tarif tawar-menawar dan transaksi (Megginson, You, & Han, 2013: 551). Faktor sosial budaya bersumber dari asumsi kesamaan budaya, bahasa, geografi yang mengikat dan menjadi ruang hubungan sosial antara negara.

Sementara itu, konteks keputusan investasi UEA di Indonesia tidak akan pernah lepas dari usulan dan bantuan UEA untuk membentuk SWFs di Indonesia. Usulan dan bantuan itu tercatat pada saat kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed ke Istana Bogor, Jawa Barat, pada 24 Juli 2019 maupun kunjungan Presiden Jokowi ke Abu Dhabi pada 12 Januari 2020 (Setkab.go.id, 2019; Maritim.go.id, 2020). Hal ini menarik lantaran kedatangan investasi UEA ke INA tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan ekonomi, melainkan juga campur tangan politik. Kombinasi kedua motif keputusan *outward investment* SWFs UAE dihimpun secara memadai oleh pendekatan *yield institutions* yang dikembangkan oleh K.S.Reddy.

Gambar 2. Ilustrasi pendekatan *yield institution* dalam strategi SWFs outward investment



Sumber: (K.S. Reddy, 2019:)

Pendekatan *yield institutions* yang dikembangkan oleh K.S Reddy sebagaimana dalam Gambar 1 memuat faktor yang memengaruhi (*influencing factor*) dan faktor imbal hasil (*resulting factor*) dalam keputusan *outward investment* yang dilakukan oleh SWFs. Faktor yang memengaruhi terdiri dari sistem geopolitik, cadangan sumber daya dan sumber pendanaan negara asal, serta perkembangan institusi dan diplomasi institusional bilateral yang mendorong pemerintah dan pemimpin SWFs memutuskan untuk berinvestasi jangka panjang berskala besar melalui strategi *outward investment* SWFs (Reddy, 2019:4). Sementara faktor imbal hasil mencakup motif ekonomi untuk mendatangkan potensi imbal hasil, integrasi ekonomi dalam mempromosikan perdagangan bilateral dan *strategic partnerships* dengan negara mitra, serta *sustainable competitive advantage* menghasilkan keuntungan kompetitif secara politik, ekonomi, dan institusional (Reddy, 2019:4).

Pada penelitian ini faktor yang memengaruhi berupa sistem geopolitik, cadangan sumber daya, sumber pendanaan dan diplomasi ekonomi UEA akan dioperasionalkan dalam poin strategi *outward investment* UEA melalui ADIA. Sementara itu, poin mengenai perkembangan institusi dan diplomasi bilateral akan dioperasionalkan ke dalam bagian meningkatnya intensitas bilateral dan diplomasi investasi Indonesia ke UEA. Sedangkan faktor imbal hasil berupa motif ekonomi dan integrasi ekonomi, termuat dalam bagian potensi imbal hasil dan integrasi ekonomi antara UEA dan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian eksplanatif. Menurut Neuman (2014), penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa sebuah fenomena terjadi, serta untuk membangun, menguraikan, memperluas, maupun menguji teori (Neuman, 2014:40). Pemilihan metode dan tipe penelitian ini selaras dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan mengapa UEA berkomitmen menjadi Investor utama terbesar di Indonesia Investment Authority (INA). Penelitian eksplanatif berusaha mencari alasan dibalik keputusan UAE berinvestasi di INA. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dari studi dokumen yang dihimpun dari sumber data sekunder. Data sekunder berasal dari siaran pers, naskah pidato, laporan resmi, buku, jurnal dan berita yang berkaitan dengan investasi UEA di Indonesia.

Teknik analisis dalam tulisan ini menggunakan model ilustratif (*illustrative method*). Model ilustratif merupakan sebuah teknik analisis data kualitatif yang menempatkan konsep-konsep teoretis ibarat kotak kosong yang akan diisi dengan data empiris (Neuman, 2014:489). Teknik ini memberikan kemudahan bagi penulis untuk memasukkan temuan-temuan dan menyesuaikannya dengan konsep analisis yang digunakan. Sehingga varian model ilustratif yang akan dipakai adalah *pattern matching* (pencocokan pola) berupa pencocokan hasil observasi dengan pola tertentu dari model teori atau konsep (Neuman W. , 2014, hal. 490). Sedangkan proses analisisnya akan dimulai dengan pengumpulan data, kemudian proses reduksi data berupa memilih dan memilih data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Strategi Outward Investment UEA Melalui Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

Keputusan investasi UEA di INA didorong oleh faktor yang memengaruhi berupa strategi *outward investment* UEA melalui ADIA. Strategi *Outward Investment* UEA mencerminkan sistem geopolitik sekaligus diplomasi ekonomi UEA. Sedangkan ADIA mencerminkan sumber pendanaan institusional yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh pemerintah UEA.

Landasan sistem geopolitik dan diplomasi ekonomi UEA berpijak pada UEA Vision 2021 dan Centennial Plan 2071. UEA Vision 2021 disusun oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, wakil presiden UAE dan pemimpin Dubai. UEA

Vision 2021 memuat agenda nasional UAE agar menjadi negara terbaik di dunia dalam hal kewirausahaan. Tujuan itu dicapai melalui ekonomi berbasis pengetahuan, mempromosikan inovasi, penelitian dan pengembangan, memperkuat kerangka peraturan untuk sektor-sektor unggulan, dan mendorong sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang menciptakan iklim bisnis dan daya tarik investasi asing (vision2021.ae, 2021). Sementara UAE Centennial 2071 merupakan agenda jangka panjang yang menjadi kelanjutan dari UEA Vision 2021, berdurasi lima dekade, bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan *soft power* UEA di kancah global.

Dalam rangka mendukung UEA Vision 2021 dan Centennial Plan 2071. Diplomasi ekonomi Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MoFAIC) UEA dikerahkan untuk menarik investasi asing, mendorong investasi keluar, mempromosikan perdagangan, dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan multilateral. Menariknya, diplomasi ekonomi UEA tidak hanya menarik investasi namun juga mendorong investasi keluar. Strategi investasi keluar (*outbound investment*) dilakukan melalui pembentukan SWFs di negara penerima dana (mofaic.gov.ae). Lewat pembentukan SWFs di negara penerima ini, UEA menjadi investor utama di berbagai belahan dunia. Hasilnya, imbal hasil investasi yang dihasilkan oleh dana SWFs ini diinvestasikan kembali ke dalam pengembangan domestik UEA, dengan porsi yang besar untuk proyek-proyek energi, industri, komunikasi dan teknologi informasi, infrastruktur, kesehatan, dan energi terbarukan.

Pembentukan SWFs di Indonesia diinisiasi langsung oleh pemerintah UEA. Pada 19 September 2019, sebelum INA terbentuk pemerintah UAE menyodorkan proposal pembentukan Indonesian Sovereign Wealth Fund yang menjadi wadah (*pooling*) dana investasi dari UAE. Tidak hanya menyodorkan proposal, pihak UAE juga berkunjung ke Indonesia untuk membahas skema, peraturan, perundangan, sekaligus berbagi pengalaman dalam pembentukan SWFs. (Maritim.go.id, 2019). Alhasil, pada 24 Maret 2021, UEA menyuntikkan dana sebesar US\$10 Miliar atau setara dengan Rp140 Triliun (asumsi kurs Rp14.000) pada INA atas instruksi dari Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (mofaic.gov.ae, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah UEA berperan besar menjadi fasilitator dalam *outward investment strategy* SWFs UEA, pembentukan SWFs di Indonesia, dan menjembatani ADIA untuk menjajaki pasar Indonesia.

ADIA didirikan pada tahun 1976 oleh Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ayah dari Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sumber pendanaan ADIA berasal dari alokasi surplus fiskal dari pemerintah Abu Dhabi. ADIA diharapkan menginvestasikan dana untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemerintah Abu Dhabi. Pada periode sebelum 1990, strategi investasi ADIA cenderung konservatif, dan agresif setelah tahun 1990an (Abdelal, 2009:318).

Strategi, lokasi, portofolio, dan pengelolaan investasi ADIA sangat terdiversifikasi. Strategi penempatan investasi di ekuitas negara maju (32-40%), ekuitas negara berkembang (10-20%), saham kapitalisasi kecil (1-5%); surat utang negara (10-20%); surat hutang perusahaan (5-10%); investasi alternatif (5-10%); *real estate* (5-10%); ekuitas swasta (5-10%); infrastruktur (2-7%); dan kas (0-10%). Lokasi penempatan investasi berada di Amerika Utara (35-50%), Eropa (20-35%), Asia (5-15%), dan Pasar Berkembang (15-25%) (ADIA, 2021). Sementara portofolio keranjang investasi ADIA terdiri dari ekuitas, *fixed income & treasury* (ADIA, 2021), ekuitas swasta, alternatif keuangan, dan infrastruktur. Sedangkan pengelolaan investasi terdiri dari jajaran direksi yang dipimpin oleh Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presiden UAE, diwakilkan oleh Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan sebagai manajer pengelola. Dalam menjalankan tugas, jajaran direksi dibantu oleh komite investasi yang terdiri dari Direktur Eksekutif semua departemen investasi.

Berdasarkan data dari Sovereign Wealth Fund Institute 2021, ADIA mengelola dana sebesar US\$ 692.9 miliar dan menduduki posisi keempat SWFs dengan total dana terbesar pada tahun 2020, setelah Norway Government Pension Fund Global, China Investment Corporation dan Kuwait Investment Authority. Tingkat imbal hasil tahunan ADIA pada 2020 selama 20 tahun dan 30 tahun, secara *point-to-point*, masing-masing adalah 6,0% dan 7,2%, dibandingkan dengan 4,8% dan 6,6% pada tahun 2019 (Adia.ae, 2020). Imbal hasil ini menunjukkan kinerja yang mumpuni dan hati-hati di tengah kondisi penuh ketidakpastian akibat COVID-19.

Meningkatnya Intensitas Bilateral dan Diplomasi Investasi Indonesia ke UEA

Intensitas hubungan bilateral dan diplomasi investasi Indonesia ke UEA turut menyemai kepercayaan yang bermuara pada komitmen investasi UEA di INA. Meningkatnya

intensitas bilateral bisa ditinjau dari sisi jumlah kunjungan, interaksi, delegasi, dan serangkaian penamaan seremonial masjid dan jalan yang menjadi simbol kedekatan kedua negara. Sementara, meningkatnya diplomasi investasi Indonesia ke UEA terwujud secara nyata dalam beragam MoU *Government to Government* (G2G) maupun *Business to Business* (B2B).

Hubungan bilateral UEA dan Indonesia sudah terjalin sejak 1976, lima tahun setelah UEA berdiri pada tanggal 2 Desember 1971. Kedutaan Besar RI di Abu Dhabi dibuka pada 28 Oktober 1978, sementara UEA membuka perwakilannya di Indonesia pada 10 Juni 1991. Selain kedutaan, Indonesia juga menempatkan Konsulat Jenderal RI dan Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) untuk mempromosikan ekspor komoditi non-migas Indonesia (Kemlu.go.id, 2021).

Hubungan UEA dan Indonesia terjalin erat di bidang politik, budaya, dan ekonomi. Dalam bidang politik, UEA selalu menghormati dan mendukung integritas Indonesia dan peran Indonesia di forum global (Kemlu.go.id, 2021). Dalam bidang budaya, UAE dan Indonesia juga memiliki kesamaan dalam mengusung islam yang inklusif, toleran, dan moderat (Sterling, 2017:110). UEA berusaha menjadi pemimpin dalam mempromosikan islam moderat, sementara Indonesia mengharapkan dunia Muslim dan masyarakat Internasional memahami kerukunan dan moderasi yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam bidang ekonomi, UEA merupakan pasar non-tradisional bagi ekspor non-migas Indonesia sekaligus pintu masuk ekspor Indonesia di wilayah Timur Tengah (Wahyudi & Sasongko, 2021: 654). Sedangkan, Indonesia merupakan pasar ekspor bagi minyak bumi, bahan kimia dan produknya, aluminium dan produknya, besi, baja, kurma, dan plastik dari UAE (Mofaic.gov.ae, 2021).

Intensitas hubungan bilateral Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2015. Pada September 2015, Presiden Joko Widodo bertandang ke Abu Dhabi dan bertemu dengan Putera Mahkota YM Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (Kemlu.go.id, 2021). Intensitas hubungan Indonesia dan UAE bisa ditinjau dari meningkatnya kunjungan dan delegasi, intensitas perdagangan, dan kedekatan pemimpin dua negara antara UAE dan Indonesia. Berdasarkan catatan dari United Arab Emirates Ministry of Economy 2020, kunjungan dari UAE ke Indonesia meningkat secara signifikan. Tahun 2015 kunjungan 2 kali dilakukan, 2016 kunjungan sekali, tahun 2017 kunjungan 4 kali, tahun 2018 mencapai 5 kali, tahun 2019 kunjungan meningkat 11 kali, dan puncaknya

pada tahun 2020 kunjungan menyentuh angka 13 kali (moec.gov.ae, 2021). Intensitas perdagangan bilateral Indonesia dan UAE mencapai US\$ 11 Miliar dari tahun 2016 sampai 2020 (Al Zeyoudi, Thani bin Ahmed, 2021). Berdasarkan pendekatan intensitas untuk indeks perdagangan berupa *Trade Intensity Index*, *Trade Specialization Index*, *Revealed Comparative Advantage Index*, *Intra-Industry Trade Index* dan *Trade Complementarity Index*, intensitas perdagangan bilateral Indonesia dan UAE menunjukkan pola komplementer (Wahyudi & Sasongko, 2021). Sehingga perdagangan bilateral antar kedua negara memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua pihak.

Kedekatan Indonesia dan UAE menjalar dari pucuk pemimpin UAE dan Indonesia. Secara fisik, kedekatan itu tergambar dari momentum penamaan nama jalan di Abu Dhabi, masjid di Abu Dhabi, masjid di Solo dan Tol Jakarta - Cikampek II. Penamaan President Joko Widodo Street di jantung kawasan Abu Dhabi National Exhibition Center dan kantor-kantor perwakilan diplomatik Abu Dhabi menunjukkan simbol kedekatan, kehormatan dan hubungan harmonis antar dua negara. (setkab.go.id, 2020). Selain itu, Abu Dhabi juga menamakan sebuah masjid atas nama “President Joko Widodo Mosque” di Abu Dhabi (Thejakartapost.com, 2020). Sementara penamaan masjid “Masjid Agung Sheikh Zayed” di Solo adalah simbol penguatan dan kedekatan hubungan bilateral antara dua negara yang menjunjung muslim moderat tersebut (Kemenag.go.id, 2021). Sedangkan, penamaan “Jalan Layang Mbz Sheikh Mohamed Bin Zayed” di ruas Tol Jakarta - Cikampek II adalah wujud pengakuan atas jasa Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan dalam mendekatkan hubungan kedua negara, antara Indonesia dan UEA (Pu.go.id, 2021).

Meningkatnya intensitas diplomasi investasi Indonesia dan UAE terjalin melalui sambungan telepon dan kunjungan resmi kedua negara. Melalui sambungan telepon pada momen Idul Fitri 2015, Presiden Jokowi bersama Pangeran mahkota Abu Dhabi dan deputy komandan tertinggi Pasukan Angkatan Darat UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan menjalin hubungan bilateral sambil membahas isu strategis bersama (khaleejtimes.com, 2015). Pada tahun yang sama, pada 13 -14 September 2015, Presiden Jokowi bertandang ke UEA untuk kali pertama sambil menggelar *One on One Meeting* dengan Managing Director Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan menghadiri pertemuan bersama pengusaha Indonesia dengan pengusaha UEA (Setkab.go.id, 2015). Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi mengajak para pengusaha

UEA untuk menggarap infrastruktur yang ada di Indonesia (Setkab.go.id, 2015). Pada tahun 2017, delegasi pemerintah UAE yang dipimpin oleh Menteri Energi Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei dilaksanakan untuk membahas peningkatan investasi perusahaan UAE di Indonesia (Setkab.go.id, 2017).

Alhasil, pada 24 Juli 2019, Mohammed bin Zayed Al Nahyan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Kunjungan kenegaraan pertama dan bersejarah setelah 29 tahun ini menghasilkan 9 MoU perjanjian bersama dan 3 MoU Business to Business, 9 MoU perjanjian bersama ini antara lain: MoU Peningkatan Perlindungan Investasi; MoU Penghindaran Pajak Berganda; MoU Industri; MoU Kepabeanaan; MoU Pariwisata; MoU Kelautan dan Perikanan; MoU Pertahanan; MoU Kekonsuleran; dan MoU Kebudayaan. Sementara 3 MoU Business to Business, antara lain: Pertamina dan Adnoc, PT Chandra Asri dan Mubadala, dan PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia (Setkab.go.id, 2019). Berdasarkan pemaparan Kemenko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, kunjungan ini menjadi cikal bakal lahirnya SWFs di Indonesia lantaran keinginan UAE membenamkan banyak investasi di Indonesia (Maritim.go.id, 2020).

Tidak lama berselang, pada 12 Januari 2020, Presiden Indonesia kembali bertandang ke UAE untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan menghadiri acara Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW). Pertemuan bilateral dengan Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan membahas tindak lanjut kedatangan Putra Mahkota Abu Dhabi ke Indonesia. Pertemuan ini membuahkan hasil dengan kesanggupan UAE membenamkan dana sebesar US\$ 22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia melalui Sovereign Wealth Fund. Pertemuan ini juga menghasilkan 16 kerja sama, 5 kerja sama sifatnya *Government to Government*, dan 11 berbentuk *business to business* (Setkab.go.id, 2020). Sementara pada acara Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW), Presiden Jokowi menjadi pembicara kunci dengan memaparkan posisi dan peran Indonesia sebagai negara penghasil nikel, biodiesel kelapa sawit sebagai sumber daya energi terbarukan, dan fungsi ibu kota baru sebagai role model teknologi dan cara hidup maju (Setkab.go.id, 2020).

Potensi Imbal Hasil dan Integrasi Ekonomi antara UEA dan Indonesia

Motif ekonomi dan integrasi ekonomi antara Indonesia dan UAE turut mendorong keputusan UAE berinvestasi besar di INA. Motif ekonomi berhubungan dengan potensi imbal hasil atau ROI dan integrasi ekonomi berkaitan dengan promosi kerja sama bilateral dan strategis antara UAE dengan Indonesia. Imbal hasil investasi SWFs berbentuk akumulasi nilai dana yang dikelola, kinerja dana, dan investasi sekuensial (Reddy, 2019). Sedangkan integrasi ekonomi terbentuk dalam IUAE-CEPA.

Pilihan investasi UAE di sektor infrastruktur, jalan, pelabuhan, pariwisata, pertanian, dan sektor potensial lainnya menawarkan imbal hasil yang tinggi. Misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Indonesia membutuhkan US\$460 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Namun, kapasitas fiskal pemerintah hanya dapat menyediakan hingga US\$215 miliar. Kesenjangan pembiayaan sampai US\$245 miliar ini tentu membutuhkan injeksi dari pihak eksternal guna menutup kekurangan. Tentu, investasi di sektor infrastruktur Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi memberikan *risk adjusted return* yang atraktif bagi investor dan *multiplier effect* bagi masyarakat. Selain itu, investasi di sektor infrastruktur memiliki peluang untuk *value creation* yang lebih dengan efisiensi biaya maupun operasional atau dengan *real estate development* (INA, 2021).

Investasi UAE di INA menawarkan berbagai skema dalam berinvestasi. INA berfokus pada investasi komersial dengan menawarkan skema penyertaan langsung. Skema penyertaan langsung melalui *private asset* atau investasi langsung dan *joint venture* atau *strategic partnership*. Kedua skema ini menjadikan berbagai korporasi domestik (BUMN maupun swasta) sebagai mitra penerima dana investasi. Perbedaannya, *private asset* atau investasi langsung secara operasional berbentuk penyertaan saham secara langsung di berbagai proyek, sedangkan *joint venture* atau *strategic partnership* berbentuk penyertaan saham sebagai mitra strategis (INA, 2021).

Pilihan investasi UAE pada INA tentu berbasis pertimbangan ekonomi yang menjanjikan dan terukur. Berdasarkan sebuah wawancara dengan Karim Mourad, Kepala Bagian Infrastruktur dari Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) mengakui bahwasanya investasi infrastruktur jalan dan pelabuhan adalah komponen penting dalam portofolio investasi yang terdiversifikasi. Infrastruktur inti atau tradisional seperti jalan

raya dan pelabuhan lebih stabil, menghasilkan arus kas yang sehat serta potensi *value creation* dan pengembangan lainnya lebih tinggi. Oleh karena itu, Karim Mourad mengakui ingin terus menggali peluang dan potensi investasi infrastruktur di Indonesia (ADIA, 2021).

Selain potensi imbal hasil dari sisi investasi, integrasi ekonomi juga menuntun langkah UAE untuk membenamkan investasi terbesar di INA. Secara umum, integrasi ekonomi memberikan ruang kerja sama perdagangan yang lebih luas antar kedua negara. Integrasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan dan jasa, sehingga perdagangan dan jasa antar kedua negara meningkat. Selama ini, angka perdagangan Indonesia dan UAE baru menyentuh angka US\$2,9 miliar (Presidenri.go.id, 2021). Sehingga, masih ada peluang dan harapan untuk meningkatkan perdagangan dan jasa antar kedua negara dengan jalan integrasi ekonomi UAE dan Indonesia.

Potensi integrasi ekonomi antara Indonesia dan UAE yang masih hangat dalam pembahasan adalah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-PEA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement/IUAE-CEPA). Perjanjian CEPA merupakan tindak lanjut dari perjanjian *foreign trade agreement* (FTA) antar kedua negara. Perbedaan CEPA dan FTA terletak pada cakupan sektor perjanjian yang lebih luas. Pembahasan perjanjian IUAE-CEPA putaran pertama, mencakup 17 bab dan terbagi ke dalam sepuluh kelompok kerja (*working groups*). Kesepuluh kelompok kerja tersebut antara lain: perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi (termasuk usaha kecil dan menengah), kekayaan intelektual, ketentuan legal dan isu institusional, pengadaan barang pemerintah, serta halal dan ekonomi syariah (Setkab.go.id, 2021).

Proses penandatanganan sebagai tanda dimulainya pembahasan perjanjian IUAE-CEPA telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri PEA Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Pada perundingan putaran pertama, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini, sementara Delegasi UEA dipimpin oleh *Assistant Undersecretary International Trade Affairs Sector, Ministry of Economy of UAE*, Juma Al Kait. Pada putaran pertama, kedua Delegasi telah menandatangani Term of

Reference (ToR) Perundingan IUAE-CEPA. ToR sebagai pedoman bagi kedua delegasi dalam menjalankan perundingan IUAE-CEPA. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan perundingan putaran kedua IUAE-CEPA di bulan Oktober 2021 (Setkab.go.id, 2021). Bila Perundingan IUAE-CEPA berhasil disepakati, hal ini akan mencatat sejarah baru sebagai perundingan dagang bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan Teluk dan perundingan dagang bilateral kedua bagi UAE di kawasan Asia Tenggara.

Simpulan

Artikel ini menarik benang merah bahwasanya komitmen investasi UAE di Indonesia didorong dan ditentukan oleh faktor yang memengaruhi (*influencing factor*) dan faktor imbal hasil (*resulting factor*). Faktor yang memengaruhi berupa strategi *outward investment* UEA melalui ADIA, intensitas hubungan bilateral Indonesia dan UEA, serta diplomasi ekonomi Indonesia pada UEA. Strategi *Outward Investment* UEA secara geopolitik tercermin dalam UEA Vision 2021 dan Centennial Plan 2071 untuk menjadi negara terbaik di dunia. UEA Vision 2021 dan Centennial Plan 2071 diwujudkan melalui diplomasi ekonomi berupa usulan pembentukan SWFs di negara penerima dana yaitu Indonesia melalui INA. Sementara, intensitas hubungan bilateral terjalin lewat peningkatan kunjungan, interaksi, delegasi, sekaligus seremoni penamaan masjid dan jalan atas nama kedua pemimpin negara sebagai simbol kedekatan. Adapun diplomasi ekonomi dari Indonesia berhubungan dengan kendala finansial yang dihadapi oleh Indonesia, sehingga membutuhkan injeksi pendanaan dari UEA yang kemudian menghasilkan beragam kerjasama *Government to Government (G2G)* maupun *Business to Business (B2B)*.

Sedangkan, faktor imbal hasil berhubungan dengan potensi imbal hasil dan integrasi ekonomi antara UEA dan Indonesia. Potensi imbal hasil berbentuk akumulasi nilai dana yang dikelola, kinerja dana, dan penciptaan nilai tambah (*value creation*) yang akan didapatkan dari investasi ADIA di INA. Adapun integrasi ekonomi berkaitan dengan pembentukan perjanjian Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE–CEPA). Perjanjian dengan cakupan luas yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara dengan

mengurangi atau bahkan menghapus hambatan tarif maupun kuota perdagangan dan jasa.

Kesimpulan ini mengisyaratkan bahwa faktor determinan dan motif keputusan *outward investment*, tidak hanya dilandasi motif ekonomi namun juga politik. Politik sebagai proses dan politik sebagai tujuan, sekaligus ekonomi sebagai proses maupun sebagai tujuan. Kedua motif ini berjalan beriringan dalam keputusan *outward investment* SWFs.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya haturkan pada Pak Makmur Keliat, Ph.D atas review, saran, dan masukannya. Sehingga proses penulisan dan penelitian ini dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdelal, R. (2009). Sovereign Wealth in Abu Dhabi. *Geopolitics*, 14(2), 317-327. doi:<https://doi.org/10.1080/14650040902827781>
- ADIA. (2021). Investment Strategy. Diambil kembali dari <https://www.adia.ae/en/investments>
- ADIA. (2021, July 27). Spotlight of Infrastructure. Diambil kembali dari https://azcdewebp0003.azureedge.net/azstcwebp0002/azure/adia/media/2020/11/adia-spotlight-on-infrastructure_1.pdf
- Adia.ae. (2020, December 31). 2020 Review Prudent Global Growth. Diambil kembali dari https://www.adia.ae/En/pr/2020/pdf/2020_ADIA_Review.pdf
- Al Zeyoudi, Thani bin Ahmed. (2021, September 03). UAE, Indonesia shaping a prosperous and resilient economic future. Jakarta. Diambil kembali dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/09/02/uae-indonesia-shaping-a-prosperous-and-resilient-economic-future.html>
- BKPM.go.id. (2020, April 20). Domestic And Foreign Direct Investment Realization Quartal 1 2020. Diambil kembali dari https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Ingg_ris_Press_Release_TW_I_2020.pdf
- BKPM.go.id. (2021, April 26). Domestic and Foreign Direct Investment Realization Quartal 1 2021. Diambil kembali dari https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Realisasi_Iny_estasi_Triwulan_I_2021_Bahasa_Ingg_ris.pdf
- BPS.go.id. (2021, Februari 05). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c). Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Cakranegara, P. (2021). Analisa Kebijakan Pembentukan Sovereign Wealth Funds di Indonesia. *Sebatik*, 25(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1261>

- CNBCIndonesia. (2021, Maret 22). Pemerintah Rayu 50 Perusahaan Global Untuk Jadi Mitra SWF RI. Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210322112525-4-231840/pemerintah-rayu-50-perusahaan-global-untuk-jadi-mitra-swf-ri>
- Devi, D. (2021). Pembentukan lembaga pengelola investasi dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja. *Bachelor thesis*. Universitas Pelita Harapan. Diambil kembali dari <http://repository.uph.edu/41678/>
- Habir, M. T. (2021, May 05). Indonesia's First Sovereign Wealth Fund (INA): Opportunities and Challenges. Singapore: © ISEAS Yusof Ishak Institute. Diambil kembali dari <http://hdl.handle.net/11540/13650>
- Halim, J. (2021). Indonesia's New Sovereign Wealth Fund: When Strategic Development Converges With Stabilization. *The Lawpreneurship Journal*, 1-29. Diambil kembali dari <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/TLJ/article/view/518>
- INA. (2021, Maret 03). Potensi Sovereign Wealth Fund dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Indonesia. *Webinar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*. Indonesia Investment Authority. Diambil kembali dari <https://balitbanghub.dephub.go.id/file/499>
- Indonesia Investment Authority. (2021, September 01). About Indonesia Investment Authority. Diambil kembali dari <https://www.ina.go.id/why-ina>
- Investor.id. (2021, Februari 03). LPI Ditargetkan Tarik Dana Rp 280 Triliun dalam 2 Tahun. Diambil kembali dari <https://investor.id/business/235987/lpi-ditargetkan-tarik-dana-rp-280-triliun-dalam-2-tahun>
- Kemenag.go.id. (2021, Maret 06). Groundbreaking Masjid Agung Sheikh Zayed di Solo Perkuat Hubungan RI-UEA. Diambil kembali dari <https://kemenag.go.id/read/groundbreaking-masjid-agung-sheikh-zayed-di-solo-perkuat-hubungan-ri-uea-p4gy1>
- Kemlu.go.id. (2021, Agustus 21). Persatuan Emirat Arab. Diambil kembali dari <https://kemlu.go.id/abudhabi/id/read/persatuan-emirat-arab/2306/etc-menu>
- Khaleejtimes.com. (2015, Agustus 18). 70 years Republic of Indonesia: Strong partners with growing UAE. Diambil kembali dari <https://www.khaleejtimes.com/indonesia-independence-day/70-years-republic-of-indonesia-strong-partners-with-growing-uae>
- Maritim.go.id. (2019, September 19). Menko Luhut: RI-UEA Jajaki Dana Abadi Sebagai Alternatif Pembiayaan. Diambil kembali dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-ri-uea-jajaki-dana-abadi-sebagai-alternatif/>
- Maritim.go.id. (2020, Januari 12). Menko Luhut: Kerja Sama Dengan UEA Adalah Terbesar Yang Disepakati Dalam Waktu Singkat. Diambil kembali dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-kerjasama-uea-adalah-terbesar-disepakati-dalam/>
- Megginson, W. L., & Fotak, V. (2015). Rise of the Fiduciary State: A Survey of Sovereign Wealth Fund Research. *International Economic Law eJournal*, 29(4), 733–778. doi:<https://doi.org/10.1111/joes.12125>
- Megginson, W. L., You, M., & Han, L. (2013). Determinants of Sovereign Wealth Fund Cross-Border Investments. *Financial Review*, 48(4), 539-572. doi:<http://dx.doi.org/10.1111/fire.12015>

- Moec.gov.ae. (2021, Agustus 21). Trade Relations Dashbord: Indonesia dan UAE. Diambil kembali dari <https://www.moec.gov.ae/en/uae-trade-relation-dashboard>
- Moec.gov.ae. (2021, Agustus 01). UAE Business Partner 2020. Diambil kembali dari <https://www.moec.gov.ae/en/home>
- Mofaic.gov.ae. (2021). *Mofaic.gov.ae*. Diambil kembali dari Mofaic.gov.ae: <https://www.mofaic.gov.ae/en/Missions/Jakarta/UAE-Relationships/Economic-Cooperation>
- Mofaic.gov.ae. (2021, Maret 24). UAE announces \$10 billion investment in Indonesia on Mohamed bin Zayed's directives. Diambil kembali dari <https://www.mofaic.gov.ae/en/missions/jakarta/media-hub/embassy-news/uae-announces-10-billion-dollars-investment-in-indonesia>
- Mofaic.gov.ae. (t.thn.). Economic Diplomacy. Diambil kembali dari <https://www.mofaic.gov.ae/en/The-Ministry/The-Foreign-Policy/Economic-Diplomacy>
- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Edition ed.). Essex: Pearson Education Limited.
- Presidenri.go.id. (2021, September 21). Presiden Joko Widodo Sambut Baik Peluncuran IUAE-CEPA. Diambil kembali dari <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-joko-widodo-sambut-baik-peluncuran-iuae-cepa/>
- Pu.go.id. (2021, April 14). Tol Jakarta - Cikampek II (Elevated) Secara Resmi Menjadi JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED. Diambil kembali dari <https://pu.go.id/berita/tol-jakarta-cikampek-ii-elevated-secara-resmi-menjadi-jalan-layang-mbz-sheikh-mohamed-bin-zayed>
- PWC. (2015, Mei). The taxonomy of of Sovereign Wealth Funds. Diambil kembali dari <https://www.pwc.com/gx/en/sovereign-wealth-investment-funds/publications/assets/pwc-the-taxonomy-of-sovereign-investment-funds.pdf>
- Reddy, K. S. (2019). 'Pot the ball? Sovereign wealth funds' outward FDI in times of global financial market turbulence: A yield institutions based view. *Central Bank Review*, 19(4), 129-139. <http://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.08.003>
- Rozanov, A. (2005, Mei 20). Who holds the wealth of nations. Dipetik Agustus 15, 2021, dari <https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/2072255/who-holds-the-wealth-of-nations>
- Samawati, P., & Paramkita, S. (2021). The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, 9(1), 77-92. <http://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20164>
- Setkab.go.id. (2015, September 14). Presiden Jokowi Ajak Pengusaha UEA Garap Proyek Infrastruktur Di Indonesia. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ajak-pengusaha-uea-garap-proyek-infrastruktur-di-indonesia/>
- Setkab.go.id. (2015, September 13). Tiba Di Abu Dhabi, Presiden Jokowi Disambut Putra Mahkota UEA. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/tiba-di-abu-dhabi-presiden-jokowi-disambut-putra-pangeran-uea/>
- Setkab.go.id. (2017, Mei 18). Menteri Energinya Bertemu Presiden Jokowi, UEA Ingin Tingkatkan Investasi Hingga Jadi 5 Miliar Dollar. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/menteri-energinya-bertemu-presiden-jokowi-uea-ingin-tingkatkan-investasi-hingga-jadi-5-miliar-dollar/>

- Setkab.go.id. (2019, Juli 24). 9 MoU Ditandatangani Dari Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi ke Istana Bogor. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/9-mou-ditandatangani-dari-kunjungan-putra-mahkota-abu-dhabi-ke-istana-bogor/>
- Setkab.go.id. (2019, Juli 24). 9 MoU Ditandatangani Dari Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi ke Istana Bogor. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/9-mou-ditandatangani-dari-kunjungan-putra-mahkota-abu-dhabi-ke-istana-bogor/>
- Setkab.go.id. (2020, Januari 13). Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW), 13 Januari 2020, di Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/abu-dhabi-sustainability-week-adsw-13-januari-2020-di-abu-dhabi-national-exhibition-centre-adnec-abu-dhabi-persatuan-emirat-arab-pea/>
- Setkab.go.id. (2020, Oktober 21). Presiden: Joko Widodo Street di Abu Dhabi Penghargaan dan Kehormatan Bagi Indonesia. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-street-di-abu-dhabi-penghargaan-dan-kehormatan-bagi-indonesia/>
- Setkab.go.id. (2020, Januari 13). Termasuk Untuk Ibu Kota Baru, Luhut: UEA Siapkan Investasi 22,8 Miliar Dollar Untuk Indonesia. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/termasuk-untuk-ibu-kota-baru-luhut-uea-siapkan-investasi-228-miliar-dollar-untuk-indonesia/>
- Setkab.go.id. (2021, September 06). IUAE-CEPA Sejarah Baru Perundingan Dagang Indonesia dengan Negara Kawasan Teluk. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/iuae-cepa-sejarah-baru-perundingan-dagang-indonesia-dengan-negara-kawasan-teluk/>
- Sovereign Wealth Fund Institute. (2021, Agustus 21). *Sovereign Wealth Fund Institute*. Diambil kembali dari Swfinstitute.org: <https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund>
- Spglobal.com. (2021, April 21). Sovereign Risk Indicators 2021. Diambil kembali dari <https://disclosure.spglobal.com/sri/>
- Sterling, J. (2017). Indonesia-UAE Relations in the Context of Regional Governance. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 11, 100-111. doi:<https://doi.org/10.1080/25765949.2017.12023320>
- Thejakartapost.com. (2020, October 21). UAE set to name mosque after Jokowi. Diambil kembali dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/21/uae-set-to-name-mosque-after-jokowi.html>
- Transparency.org. (2021, Agustus 21). Corruption Perception Index. Diambil kembali dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>
- Vision2021.ae. (2021, Agustus 21). Diambil kembali dari <https://www.vision2021.ae/en/national-agenda-2021/list/economy-circle>
- Wahyudi, Y., & Sasongko, G. (2021). Perdagangan Bilateral Indonesia –Persatuan Emirat Arab (PEA): Pendekatan Intensitas. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 653-666. Diambil kembali dari <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3720>
- Wood, G., & Wright, M. (2015). Corporations and New Statism: Trends and Research Priorities. *Academy of Management Perspectives*, 271-286. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/43822388>